

MSG Meeting:

Pembahasan Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia Ke Sembilan

KESDM, Sekretariat EITI
11 Juni 2021

Latar Belakang dan Agenda

LATAR BELAKANG

- Memenuhi kewajiban transparansi sebagai pengelola sumber daya alam;
- Menjaga penilaian Indonesia dalam organisasi EITI;
- Memenuhi *timeline workplan* yang sudah disepakati;
- Menjaga komunikasi *Multi Stakeholder Group* Industri Ekstraktif; dan
- Memenuhi persyaratan standar EITI dalam penyusunan pelaporan EITI.

Agenda

- Scoping Study Laporan 2021
- Persetujuan Kegiatan dan Program Sekretariat EITI International

Pelaporan EITI Indonesia Ke Delapan



<https://eiti.esdm.go.id>

Indonesia published its latest [EITI Report](#) in March, adopting the [flexible reporting measures](#) introduced by the EITI Board in 2020. While the report mainly covers the 2018 fiscal year, it also documents the impact of the COVID-19 crisis on Indonesia's extractive sector in 2020 – including its effects on production, exports and revenues – and highlights some of the government's response measures.

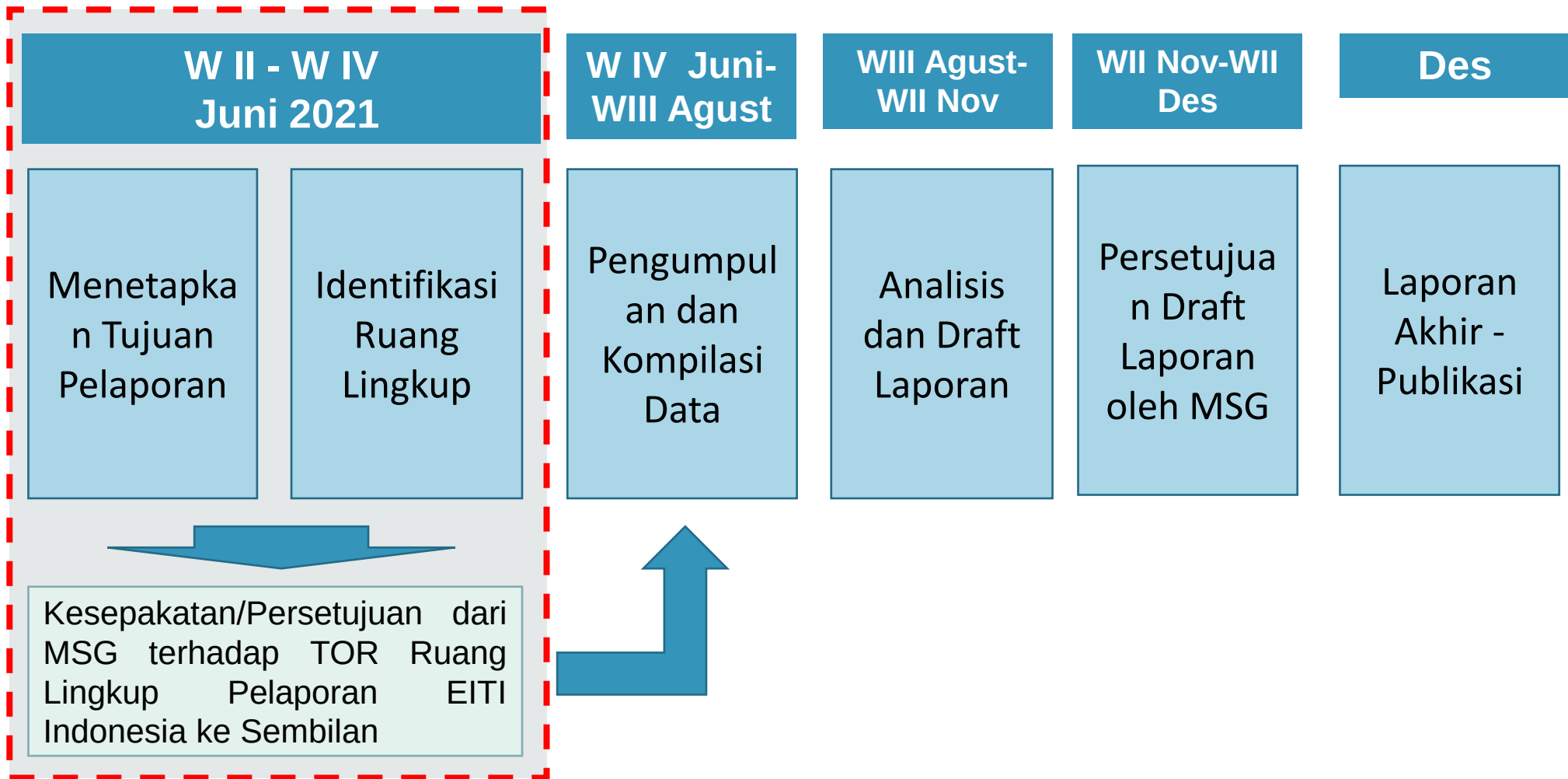
Hon. Arifin Tasrif, Indonesia's Minister of Energy and Mineral Resources, noted that Indonesia's EITI Report was produced in the spirit of sustaining transparency in the extractive industries. "We want to inform our citizens on the impact of the pandemic on the sector as well as policies introduced by our government in handling COVID-19 and restoring the national economy".

” The report is a good example of what can be achieved using the flexible reporting measures introduced by the EITI Board in 2020, said EITI Executive Director Mark Robinson.

<https://eiti.org/news/new-report-shows-indonesias-extractive-revenues-in-decline>

”

Rencana Kerja Pelaporan EITI Indonesia ke 9 Tahun 2021



Acuan Pelaporan EITI Indonesia ke 9 Tahun 2021 (1/3)

A. *Standard EITI 2019 – Flexible Report**

Flexible EITI Reporting

MSG dapat menggunakan fleksibilitas ini untuk mengkomunikasikan data tepat waktu yang relevan dengan kondisi pandemic covid-19.

Document Requirements

Pelaporan memenuhi persyaratan pengungkapan informasi sesuai standar EITI 2019 (req. 2-6) yang disepakati oleh MSG.

Disclosure Requirements

Negara menerbitkan Laporan EITI dijadwalkan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

1. **Informasi tentang perkembangan sektor ekstraktif** dan prospek industri saat ini dan ke depan, serta hubungan dengan dampak COVID-19, antara lain: Informasi tentang perubahan lisensi dan negosiasi atau persyaratan kontrak; Penyesuaian terhadap rezim fiskal; Insentif; Eksplorasi atau pengembangan; Produksi, ekspor dan lapangan kerja; Perubahan kepesertaan negara dan kebijakan badan usaha milik negara; Pendapatan dan anggaran; dan Isu lain yang disepakati oleh MSGs.

2. **Pengungkapan sepihak** oleh pemerintah dan/atau perusahaan sesuai dengan Persyaratan EITI 2, 3, 4, 5 dan 6 yang mencakup semua informasi dalam pengungkapan EITI Standar EITI 2019 yang telah disepakati MSG.
3. **Pengungkapan data terkini.**
4. **Gambaran lengkap (komprehensif) dari data yang diungkap.**
5. **Penilaian oleh MSG** atas kelengkapan dan keandalan data yang diungkapkan, mengidentifikasi setiap celah atau kelemahan dalam pengungkapan sesuai dengan Standar EITI 2019.

* https://eiti.org/files/documents/explainer_flexible_reporting_requirements_oct2020.pdf

Acuan Pelaporan EITI Indonesia ke 9 Tahun 2021 (2/3)

B. Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia 2018 (Laporan ke Delapan)

			
DAFTAR ISI			
KATA PENGANTAR		I	
DAFTAR ISI		II	
DAFTAR TABEL		IV	
DAFTAR GAMBAR		VII	
BAB I PENDAHULUAN			
1.1. LATAR BELAKANG		1	
1.2. TUJUAN LAPORAN KONTEKSTUAL		4	
1.3. RUANG LINGKUP		4	
1.4. METODOLOGI PROSES PELAPORAN		6	
1.5. PELAKSANAAN EITI DI INDONESIA		7	
1.6. RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN EITI DI INDONESIA		11	
BAB II GAMBARAN POKOK KEGIATAN INDUSTRI EKSTRAKTIF			
2.1. KEGIATAN INDUSTRI EKSTRAKTIF		15	
2.1.1. Sektor Migas		15	
2.1.2. Sektor Minerba		18	
2.2. INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT INDUSTRI EKSTRAKTIF		21	
2.2.1. Sektor Migas		24	
2.2.2. Sektor Minerba		25	
2.2.3. Instansi Yang Berperan Penting Dalam Sektor Migas dan Minerba		26	
BAB III KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF			
3.1. LANDASAN KONSTITUSIONAL TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF		32	
3.1.1. SEKTOR MIGAS		34	
3.1.2. SEKTOR MINERBA		34	
3.2. REGULASI INDUSTRI EKSTRAKTIF BERDASARKAN VALUE CHAIN		42	
3.2.1. VALUE CHAIN I: CONTRACTS AND LICENSES		43	
3.2.1.1. Sektor Migas		43	
3.2.1.2. Sektor Minerba		46	
3.2.2. VALUE CHAIN II: PRODUCTION		55	
3.2.2.1. Sektor Migas		55	
3.2.2.2. Sektor Minerba		57	
3.2.3. VALUE CHAIN III: REVENUE COLLECTION		59	
3.2.3.1. Sektor Migas		59	
3.2.3.2. Sektor Minerba		64	
3.2.4. VALUE CHAIN IV: REVENUE ALLOCATION		69	
3.2.5. VALUE CHAIN V: SOCIAL AND ECONOMIC CONTRIBUTION		69	
3.2.5.1. Sektor Migas		70	
3.2.5.2. Sektor Minerba		70	
3.3. REGULASI TERKAIT BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)		72	
3.4. PERATURAN LAINNYA TERKAIT INDUSTRI EKSTRAKTIF		74	
BAB IV IMPLEMENTASI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA			
4.1. PERIZINAN INDUSTRI EKSTRAKTIF (TAHUN 2018-2019)		77	
4.1.1. Sektor Migas		77	
4.1.1.1. Jenis Perizinan dan Kontrak		77	
4.1.1.2. Penawaran WK 2018-2019		85	
4.1.1.3. Pengalihan Participating Interest (PI)		86	
4.1.1.4. Terminasi Kontrak		89	
4.1.1.5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Ex-KKKS Terminasi		90	
4.1.1.6. Pengelolaan Sumur Tua		91	
4.1.2. Sektor Minerba		94	
4.1.2.1. Penetapan Wilayah Pertambangan		94	
4.1.2.2. Kontrak dan Perizinan		99	
4.1.2.3. Lelang WIUP dan WIUPK		103	
4.2. KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF		105	
4.2.1. Sektor Migas		105	
4.2.1.1. Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Migas		105	
4.2.1.2. Realisasi Investasi Sektor Migas		106	
4.2.1.3. Sumber Daya dan Cadangan Migas di Indonesia		107	
4.2.1.4. Produksi Migas di Indonesia		110	
4.2.1.5. Ekspor Migas		115	
4.2.2. Sektor Minerba		118	
4.2.2.1. Pengeluaran untuk Kegiatan Eksplorasi Minerba		118	
4.2.2.2. Sumber Daya dan Cadangan Minerba di Indonesia		124	
4.2.2.3. Produksi Minerba di Indonesia		132	
4.2.2.4. Perkembangan Penjualan Minerba		138	
4.2.2.5. Kontribusi Terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah		147	
4.3. BUMN INDUSTRI EKSTRAKTIF		149	
4.3.1. Hubungan Keuangan antara BUMN dan Pemerintah		150	
4.3.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif		154	
4.3.2.1. Holding BUMN Sektor Migas		155	
4.3.2.2. Holding BUMN Sektor Minerba		165	
4.3.3. Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia		178	
BAB V PENERIMAAN DAN ALOKASI PENDAPATAN NEGARA			
5.1. PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF		183	
5.2. ALOKASI PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF		194	

Acuan Pelaporan EITI Indonesia ke 9 Tahun 2021 (3/3)

B. Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia 2018 (Laporan ke Delapan)

	
BAB VI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TERINTEGRASI	
6.1 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MIGAS	204
6.2 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI MINERBA	204
6.3 PENERAPAN PENGARUSUTAMAAN (MAINSTREAMING).....	218
BAB VII TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	
7.1 TANGGUNG JAWAB SOSIAL	221
7.1.1 Sektor Migas	221
7.1.2 Sektor Minerba	227
7.2 TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN	230
7.2.1 Sektor Migas	230
7.2.2 Sektor Minerba	233
BAB VIII DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA INDUSTRI EKSTRAKTIF	
8.1 EKONOMI GLOBAL PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	237
8.1.1 Perkembangan perekonomian Dunia dan Negara Industri	237
8.1.2 Perkembangan Perekonomian Nasional	240
8.1.3 Kondisi Industri Ekstraktif Nasional	245
8.1.3.1 Sektor Migas	245
8.1.3.2 Sektor Minerba	247
8.2 REGULASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA	247
8.2.1 Sektor Migas	248
8.2.2 Sektor Minerba	249
8.3 IMPLEMENTASI KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	253
8.3.1 Sektor Migas	253
8.3.2 LNG	256
8.3.3 Sektor Minerba	256
8.3.3.1 Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Minerba.....	256
8.3.3.2 Produksi Minerba di Indonesia	257
8.3.3.3 Perkembangan Penjualan Minerba	262
8.4 PENERIMAAN DAN ALOKASI PENDAPATAN NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	270
8.4.1 Sektor Migas	270
8.4.1.1 Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara dari Sektor Migas di Masa Pandemi Covid-19	270
8.4.1.2 DBH Dibandingkan Sebelum dan Sesudah Covid	270
8.4.1.3 Perimbangan Investasi Migas Sebelum dan Sesudah Covid	274
8.4.2 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Dampak Covid-19	276
8.4.3 Sektor Minerba	278
8.4.3.1 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	277
8.4.3.2 Alokasi Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif.....	279
8.5 SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	288
8.5.1 Sektor Migas	288
8.5.2 Sektor Minerba	289
8.6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 ..	290
8.6.1 Tanggung Jawab Sosial	290
8.6.1.1 Sektor Migas	290
8.6.1.2 Sektor Minerba	291
8.6.2 Tanggung Jawab Lingkungan	292
8.6.2.1 Sektor Migas	292
8.6.2.2 Sektor Minerba	293
BAB IX REFORMASI KEBIJAKAN INDUSTRI EKSTRAKTIF	
9.1 KEBIJAKAN INDUSTRI EKSTRAKTIF BERDASARKAN RANTAI NILAI (VALUE CHAIN)	294
9.1.1 Sektor Migas	294
9.1.1.1 Penyederhanaan Perizinan Migas	294
9.1.1.2 Penyediaan dan Keterbukaan Data Migas	295
9.1.1.3 Fleksibilitas Sistem Fiskal	296
9.1.1.4 Stimulus Fiskal	297
9.1.2 Sektor Minerba	298
9.1.2.1 Value Chain I: Kontrak dan Perizinan	298
9.1.2.2 Value Chain II: Produksi	301
9.1.2.3 Value Chain III: Penerimaan Negara	303
9.1.2.4 Value Chain IV: Alokasi Penerimaan Negara	304
9.1.2.5 Value Chain V: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	305
9.2 STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)	306
9.2.1 Regulasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	306
9.2.2 Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK)	308
9.2.3 Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	310
9.2.4 Implementasi Stranas PK di Sektor Industri Ekstraktif	312
9.3 BENEFICIAL OWNERSHIP	317

Poin Pelaporan EITI Indonesia ke 9 Tahun 2021

NO	Informasi yang harus diungkapkan atau disediakan	Analisis
1	Mengidentifikasi informasi yang akan diungkapkan untuk memenuhi Persyaratan EITI 2-6.	• Mampu menjawab gap masalah yang sebelumnya telah diidentifikasi dalam Laporan dan Validasi EITI.
2	Menyepakati tahun fiskal yang akan dicakup dalam pengungkapan informasi.	• Pendapatan, produksi, dan data lainnya harus mencakup tahun fiskal 2019. • Waktu <i>cut-off</i> untuk update informasi tahun 2020
3	Menyepakati definisi aliran pendapatan dan entitas yang melakukan dan penerimaan pembayaran	• Dalam menetapkan definisi pendapatan dan ambang batasnya, MSG harus membandingkan jumlah aliran pendapatan dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan total pendapatan pemerintah. MSG dapat menggunakan ambang batas yang telah digunakan dalam periode pelaporan sebelumnya, atau menyesuaikan ambang batas untuk menitikberatkan pada aliran pendapatan dan entitas pelapor yang dianggap paling utama. • Bagaimana cara meningkatkan peran aktif perusahaan. Berdasarkan hasil kuisisioner Laporan EITI Indonesia 2018, tingkat partisipasi relatif minim, perusahaan migas 85% dan minerba 20%.

Usulan Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia ke 9 Tahun 2021 (1/4)

Bab	Ruang Lingkup Umum	Standar EITI 2019
Bab I Pendahuluan	• Latar Belakang • Tujuan Laporan Konstektual • Ruang Lingkup • Metodologi Proses Pelaporan • Pelaksanaan EITI di Indonesia	
Bab II Gambaran Kegiatan Industri Ekstraktif dan Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif	Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif menjelaskan mengenai kegiatan dan instansi yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Minyak dan Gas bumi (Migas) dan mineral dan batubara (Minerba). Dan data dari Kementerian /Lembaga yang terkait serta kewenangannya	2.1 Legal Framework and fiscal regime
Bab III Implementasi Kegiatan Industri Ekstraktif	Terkait kegiatan yang dilakukan dalam industri ekstraktif dengan pembagian sektor minyak dan gas bumi dan sektor mineral batubara. Adapun katagori informasi dibagi menjadi 2 yaitu: pertama proses perizinan dan kedua adalah kontribusi sektor industri ekstraktif.	2.2 Contract and license allocations 2.3 Register of licenses 2.4 Contracts 3.1 Exploration 3.2 Production 3.3 Exports

Usulan Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia ke 9 Tahun 2021 (2/4)

Bab	Ruang Lingkup Umum	Standar EITI 2019
Bab IV Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara	Informasi terdiri: • Komposisi Realisasi Pendapatan Negara, • Penerimaan Perpajakan, • Penerimaan Bukan Pajak, • Alokasi Penerimaan Negara Dari Industri Ekstraktif, • Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat, • Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.	4.1 Comprehensive disclosure of taxes and revenues 4.2 Sale of the state's share of production or other revenues collected in kind 4.3 Infrastructure provisions and barter arrangements 4.4 Transportation Revenues 4.5 Transactions related to state-owned enterprises (SOEs) 4.6 Subnational Payments 4.7 Level of disaggregation 4.8 Data timeliness 4.9 Data quality and assurance 5.1 Distribution of extractive industry revenues 5.2 Subnational transfers 5.3 Revenue management and expenditures

Usulan Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia ke 9 Tahun 2021 (3/4)

Bab	Ruang Lingkup Umum	Standar EITI 2019
Bab V Peran Badan Usaha Milik Negara	Informasi terdiri: • Hubungan Keuangan antara BUMN dan Pemerintah • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Industri • Ekstraktif • Holding BUMN • Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia	2.6 State participation 4.5 Transactions related to state-owned enterprises (SOEs) 6.2 Quasi-fiscal expenditures
Bab VI Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Informasi yang terkandung dapat dibagi menjadi sosial dan lingkungan. • Tanggung jawab sosial meliputi: program sosial melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di mana bidang-bidang di dalamnya yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, fasilitas sosial/umum (infrastruktur), dan lingkungan. • Tanggung jawab lingkungan meliputi: pengelolaan lingkungan, ASR, biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan, penempatan jaminan reklamasi, realisasi jaminan reklamasi.	6.1 Social and environmental expenditures by extractive companies 6.4 Environmental impact of extractive activities

Usulan Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia ke 9 Tahun 2021 (4/4)

Bab	Ruang Lingkup Umum	Standar EITI 2019
Bab VII Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional	Berisi penjelasan untuk menjawab berbagai isu yang berkembang di industri ekstraktif yang sesuai dengan standard EITI dan flexible report, serta isu pada laporan ke delapan belum dibahas. Isu tersebut yaitu: pemulihan ekonomi nasional pasca covid-19, <i>commodity trading</i> , dampak lingkungan, dampak terhadap masyarakat adat dan gender.	6.3 The contribution of the extractive sector to the economy
Bab VIII Kebijakan di Industri Ekstraktif	Terkait reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk industri ekstraktif pada masing-masing berdasarkan rantai nilai (value chain). Informasi harus diungkap antara lain: • Perkembangan integrasi teknologi informasi • Kebijakan sesuai value chain • Disclosure contract • Beneficial ownership	2.5 Beneficial Ownership 7.2 Data accessibility and open data 7.3 Recommendation from EITI implementation

Kegiatan yang Diusulkan Sekretariat EITI Internasional

- Pelatihan penyusunan EITI Work Plan oleh tim EITI Secretariat dan World Bank (menunggu penyusunan jadwal dari EITI Secretariat Int'l) → Rencana Join Meeting antara World Bank dengan EITI Secretariat :
 - Klarifikasi Scope of Work dan Work Plan EITI 2021
 - Klarifikasi checklist self-validation melalui systematic disclosure
- Tawaran *independent scooping study* untuk penerapan *contract disclosure* :
 - Konsultasi dan workshop dari USAID
 - *Indonesia's contract regime O&G; legal framework; implementation; barriers; etc.*
 - Waktu Penyelenggaran sekitar bulan Juli 2021
- Indonesia terpilih untuk menjadi pilot project penerapan BO “*Open Extractive Program*”
- Indonesia diminta untuk sharing terkait *best practice* Anti Korupsi pada acara EITI Regional Forum 22 Juni 2021, menyangkut:
 - Inventarisasi *Impact Evaluation*;
 - *Education*;
 - Pembinaan-Koordinasi-Supervisi; dan
 - *Law Enforcement*



www.eiti.esdm.go.id

TERIMA KASIH

Kontak: Sekretariat-eiti@esdm.go.id